BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia berkaitan dengan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang secara bertahap terbukti menjadi pilar stabilitas nasional ditengah fluktuasi pasar global. UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omset yang relatif kecil serta umumnya didirikan dengan modal yang minim atau terbatas (Hapsari dkk., 2024). Sejak tahun 2022, Jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai angka 64,2 juta unit dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%. (Mainake, 2022; Hapsari dkk., 2024). Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja. Hal tersebut telah terbukti saat krisis ekonomi global pada tahun 1997, dimana Indonesia mengalami lonjakan inflasi yang menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), akan tetapi UMKM tetap mampu bertahan ditengah krisis tersebut dan banyak menyerap tenaga kerja lokal (Juanidi, 2023).

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sektor perekonomiannya didominasi oleh UMKM. Bagi Provinsi Bali, UMKM memiliki peran yang cukup sentral, terutama karena Bali tidak memiliki sumber daya alam mineral seperti minyak dan gas bumi. Perekonomian daerah ini sebagian besar bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, serta berbagai layanan yang mendukung kegiatan pariwisata. Pengembangan industri berskala besar menghadapi hambatan berupa keterbatasan bahan baku, ketersediaan lahan, serta kekhawatiran akan

dampak negatif terhadap sektor pariwisata. Kondisi ini mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan UMKM sebagai salah satu dampak berganda (*multiplier effect*) dari perkembangan sektor pariwisata (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019).

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM					% Kenaikan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Buleleng	34.552	34.374	54.489	57.216	66.368	19,74%
2	Badung	19.688	19.261	22.647	40.989	21.699	12,34%
3	Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072	35.792	42,35%
4	Jembrana	27.654	24.346	46.227	66.537	67.183	30,70%
5	Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160	47.957	3,74%
6	Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620	75.666	0,08%
7	Bangli	44.068	44.068	44.123	44.175	44.251	0,10%
8	Karangasem	39.589	40.468	57.456	40.614	50.717	9,96%
9	Denpasar	31.826	32.026	32.224	36.072	35.792	1,61%

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (2023)

Tabel 1.1 memperlihatkan data perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Bali sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Dari data yang disajikan, diantara seluruh kabupaten di Bali, Buleleng menjadi Kabupaten yang memiliki perkembangan menarik untuk diperhatikan. Buleleng merupakan Kabupaten terluas dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali dengan luas wilayahnya sebesar 1.365,88 km^2 atau 24,25% dari luas Pulau Bali (Badan Riset dan Inovasi Daerah, 2023) Berdasarkan data pada tabel, jumlah UMKM di Buleleng sepanjang tahun 2019–2023 terus bertambah dari 34.552 usaha menjadi 66.368 usaha. Lonjakan ini tidak hanya menggambarkan peningkatan kuantitas pelaku UMKM, tetapi juga mengindikasikan semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas kewirausahaan sebagai sumber mata pencaharian.

Kebergantungan masyarakat terhadap kegiatan berwirausaha juga harus didadasari oleh kemampuan dari masyarakat tersebut sebagai pelaku usaha dimana ketika mereka mulai mendirikan UMKM maka mereka sebagai pelaku usaha harus bisa menjaga stabilitas kinerja keuangan usahanya. Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan sebuah usaha dalam mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan (Mokoginta, 2025). Bila UMKM mampu menghasilkan keuntungan maka modal untuk menjalankan usaha tetap terjaga dan pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban kreditnya. Bagi UMKM, kinerja keuangan yang kuat dapat menjadi faktor penentu dalam kelangsungan bisnis, pertumbuhan, dan kemampuan untuk berkembang atau berinvestasi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang buruk dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, menghadapi tekanan likuiditas, dan bahkan berisiko bangkrut (Agustiani dkk., 2025). Oleh karena itu, penting bagi UMKM agar kinerja keuangan usahanya tetap stabil. Namun faktanya kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng masih belum optimal. Permasalahan ini ditunjukkan oleh besarnya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit UMKM. Berikut merupakan rata-rata NPL kredit UMKM setiap kabupaten di Provinsi Bali.

Tabel 1.2
Rata-rata NPL Kredit UMKM Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	%
Denpasar	2,99
Badung	3,08
Gianyar	1,07
Buleleng	3,91
Tabanan	1,76
Karangasem	3,47
Jembrana	2,23
Bangli	1,19
Klungkung	3,21

Sumber: Bank Indonesia (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan data perbandingan tingkat NPL kredit UMKM pada masing-masing Kabupaten di Provinsi Bali. NPL kredit UMKM adalah keadaan dimana UMKM tidak lagi bisa memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok atau bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui (Purnomo, 2025). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Kabupaten Buleleng relatif memiliki rata-rata NPL kredit UMKM yang tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya yaitu 3,91% sehingga data ini menyimpulkan masih adanya UMKM yang kesulitan dalam membayar kewajiban karena belum mampu memperoleh pendapatan usaha yang sesuai. Pernyataan ini didukung oleh Asih & Atmadja (2022) bahwa pendapatan debitur mampu memengaruhi kemampuan tingkat kelancaran pengembalian kredit secara positif dan signifikan.

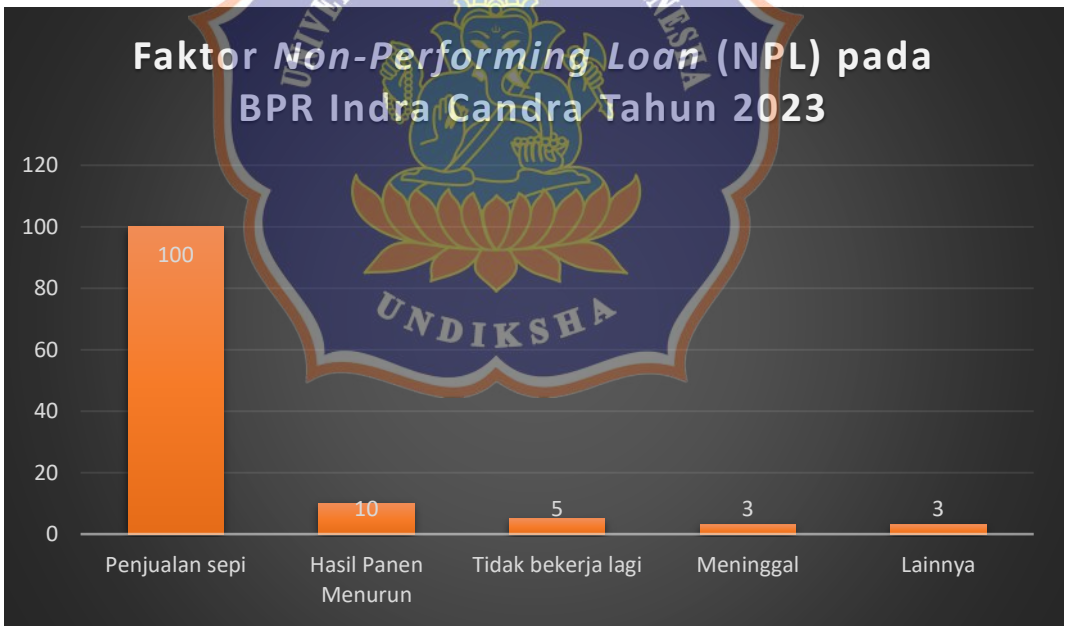

Gambar 1.1
Faktor Non-Performing Loan (NPL) pada BPR Indra Candra Tahun 2023
(Sumber: Laporan Tahunan BPR Indra Candra, 2023)

Gambar 1.1 menunjukkan faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) pada BPR Indra Candra tahun 2023. Pada data tersebut diketahui bahwa total kredit yang berkategori macet pada BPR Indra

Candra sebesar 121 orang debitur dan dari total tersebut faktor yang menyebabkan ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya didominasi oleh kondisi penjualan usaha yang sepi yang dialami oleh 100 orang debitur, kemudian diikuti dengan adanya masalah pada penurunan hasil panen sebanyak 10 orang debitur, tidak bekerja lagi sebesar 5 orang debitur dan meninggal dunia sebanyak 3 orang debitur, serta faktor lain di luar faktor yang disebutkan sejumlah 3 orang debitur. Melalui data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit akibat rendahnya pendapatan usaha. Kondisi penjualan yang sepi secara langsung berdampak pada pendapatan usaha yang menurun dan kemampuan usaha dalam menghasilkan laba menjadi rendah, sehingga kinerja keuangan pelaku usaha menjadi tidak optimal.

Selain data tingginya NPL di Kabupaten Buleleng, Hasil observasi dengan wawancara kepada 11 pelaku UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng menguatkan informasi bahwa kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng sedang berada pada kondisi yang kurang baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ini disebabkan karena adanya kesulitan UMKM dalam memperoleh laba usaha mereka sehingga modal yang mereka miliki menjadi sedikit. Keterbatasan modal membuat pelaku UMKM kuliner sulit untuk membeli persediaan bahan baku. Kebanyakan dari pemilik warung makan menyatakan, bahwa beliau tidak membeli persediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup seperti telur dan beras sehingga apabila ada pelanggan yang datang dan persediaan habis maka beliau akan membeli lagi di warung sembako dekat rumah mereka. Kesulitan memperoleh laba juga dikarenakan minimnya pelaku UMKM yang mampu menyusun laporan keuangan sehingga mereka tidak mendata transaksi

pembelian dan penjualan mereka. Sebesar 6 dari 11 pelaku UMKM yang menjadi narasumber dalam wawancara menyatakan bahwa mereka menggabungkan uang usaha mereka dengan uang pribadi sehingga, apabila terdapat kebutuhan pribadi maka mereka sering mengambil dari hasil usahanya tanpa mencatatnya. Ketidakmampuan dalam memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta tidak adanya pencatatan transaksi yang jelas menyebabkan pelaku UMKM tidak dapat mengetahui secara pasti kondisi keuangan usahanya, termasuk besarnya keuntungan maupun kerugian yang dialami. Akibatnya, pengambilan keputusan usaha menjadi tidak didasarkan pada informasi keuangan yang akurat, melainkan hanya berdasarkan perkiraan semata. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya kemampuan UMKM sektor kuliner untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

Kabupaten Buleleng memiliki sembilan kecamatan yang didalamnya tersebar berbagai UMKM dengan segala sektor, salah satu sektor yang menarik untuk dibahas adalah sektor kuliner. Berdasarkan artikel oleh Duwika & Samudra (2024) menyatakan bahwa sektor kuliner memiliki peranan yang cukup penting dalam menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng dilihat dari survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sekitar 15.000 tenaga kerja terserap di sektor kuliner, dengan ragam peran mulai dari juru masak, pelayan, kasir, hingga pemasok bahan baku. Sektor kuliner mencakup bermacam-macam usaha seperti warung makan dan restoran. Setiap jenis usaha kuliner ini berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Namun, usaha sektor kuliner merupakan sektor yang sangat rentan dalam hal keberlanjutan.

Fenomena yang kerap menjadi perhatian di lapangan adalah rendahnya tingkat keberlanjutan UMKM kuliner dalam jangka panjang. Sering kali, unit usaha ini menunjukkan performa yang fluktuatif, di mana lonjakan popularitas yang masif hanya terjadi secara singkat. Lonjakan penjualan umumnya hanya terjadi pada fase awal pembukaan usaha, ketika rasa penasaran konsumen masih tinggi dan mendorong mereka untuk mencoba produk yang ditawarkan. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, minat konsumen cenderung menurun, sehingga terjadi penurunan jumlah pelanggan yang beralih ke usaha kuliner lain. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM kuliner belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mempertahankan daya saingnya. Wawancara yang telah dilakukan oleh Ramdani & Sujana (2024) kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Disdagperinkop-UKM) Kabupaten Buleleng menyampaikan bahwa UMKM di sektor kuliner umumnya memiliki sifat usaha yang kurang stabil serta tingkat keberlangsungan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan UMKM pada sektor lainnya. Berdasarkan fakta tersebut penelitian terhadap kinerja keuangan pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng sangat perlu dilakukan.

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan telah diuraikan dalam teori *Resource-Based View* (RBV). Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Wenerfelt (1984) yang menjelaskan bahwa suatu usaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya usahanya akan memiliki keunggulan dalam persaingan usaha dan dapat mencapai kinerja keuangan yang baik. Sumber daya (*Resources*) adalah segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai kekuatan atau kelemahan dari suatu perusahaan. Secara lebih formal, sumber daya perusahaan

pada waktu tertentu dapat didefinisikan sebagai aset-aset (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang terikat pada perusahaan (Caves, 1980; Wenerfelt, 1984). Menurut Barney (1991) Sumber daya perusahaan dapat diklasifikasikann menjadi tiga kategori yakni sumber daya fisik (teknologi fisik yang digunakan dalam perusahaan, pabrik dan peralatan perusahaan, lokasi geografisnya, serta akses terhadap bahan baku), sumber daya modal manusia (pelatihan, pengalaman, penilaian, kecerdasan, hubungan, dan wawasan para manajer dan pekerja individu dalam perusahaan), dan sumber daya modal organisasi (struktur pelaporan formal perusahaan, sistem perencanaan, pengendalian, dan koordinasi baik formal maupun informal, serta hubungan informal antar kelompok di dalam perusahaan dan antara perusahaan dengan pihak-pihak di lingkungannya). Melalui pandangan ini, agar mampu menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik maka tiga faktor yang diduga memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng yaitu Akses Permodalan, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan, dan Digitalisasi Pencatatan Keuangan.

Faktor pertama yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah Akses permodalan yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya modal organisasi. Akses permodalan merupakan kemudahaan sebuah entitas bisnis untuk memperoleh sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memulai, mengoperasikan, atau mengembangkan usahanya disebut sebagai akses permodalan (Margareta & Mandasari, 2025). Modal usaha telah menjadi hal pokok dalam sebuah usaha. Agar suatu UMKM dapat berdiri dan terus berjalan maka pelaku UMKM harus mempunyai modal cukup. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai skema pembiayaan inklusif. Dikutip dari antaranews.com (2021) dalam

Masdiantini dkk (2024) menyatakan bahwa Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) dimana ini merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional telah diberikan kepada 216.956 pelaku UMKM di Provinsi Bali. BPUM ini mayoritas diterima oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yaitu dengan besaran dana Rp. 90, 53 Milyar.

Selain BPUM tersebut pemerintah juga telah mengadakan program permodalan bagi UMKM melalui kredit yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama. Namun, berdasarkan situs Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali (2025), Hingga akhir Juni 2025 realisasi penyaluran KUR di Bali sebesar 5,03 triliun dengan total debitur mencapai 65,7 ribu pelaku UMKM. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyaluran KUR telah mengalami penurunan sebesar 14,46%. Penurunan ini mengisyaratkan adanya tantangan serius yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh dukungan pembiayaan, terlebih di tengah inflasi dari tahun ke tahun kebutuhan modal terus meningkat untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha. Hal ini juga didukung dengan observasi awal yang telah dilakukan pada salah satu bank perekonomian rakyat (BPR) di Kabupaten Buleleng yakni BPR Indra Candra pada kantor pusat di Singaraja, yang mana masih terlihat adanya pengajuan KUR yang tidak dapat dilanjutkan karena adanya persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM seperti usia calon debitur yang tidak sesuai kriteria, agunan yang masih kurang, riwayat kredit terdahulu, dan sedang menjalankan program pemerintah lain.

Situasi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan skema kredit seperti KUR belum sepenuhnya menjamin kemudahan akses bagi seluruh UMKM ditambah lagi

dengan tingginya angka NPL di Kabupaten Buleleng akan membuat bank semakin ketat dalam menyeleksi pengajuan kredit. Menurut Suardana (2025) Tingkat NPL yang tinggi menandakan banyaknya kredit macet dari UMKM, yang mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman baru. Risiko gagal bayar yang tinggi membuat bank memberlakukan standar yang lebih ketat dan menaikkan suku bunga pinjaman, sehingga membatasi akses UMKM terhadap permodalan. Situasi ini dapat menghambat pertumbuhan sektor UMKM, yang sangat bergantung pada pinjaman untuk modal usaha. Salah satu sektor yang merasakan dampak terhadap kesulitan memperoleh modal dari KUR adalah sektor kuliner. Menurut Gama (2026) menjalankan usaha kuliner membutuhkan modal yang tidak sedikit, mulai dari bahan baku, peralatan masak, hingga sewa tempat. Maka dari itu, fenomena ini dapat menyebabkan perkembangan UMKM sektor kuliner menjadi lambat.

Sebagai solusi atas sulitnya akses perbankan konvensional, terdapat layanan pembiayaan lain yang saat ini sedang tren di kalangan masyarakat yaitu Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Peer-to-Peer Lending* (*P2P Lending*). Perkembangan *P2P lending* bahkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh alternatif sumber pembiayaan di luar perbankan (Herawati dkk., 2020). Sejak UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diresmikan, LPBBTI tumbuh pesat dan menjadi solusi pendanaan bagi masyarakat yang kurang bisa terlayani oleh sistem keuangan konvensional (*undeserved*) terutama para pelaku UMKM. Meskipun begitu, banyak pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang menghindari penggunaan layanan ini karena maraknya LPBBTI ilegal yang sedang marak untuk menjebak para debitur.

Kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelaku UMKM terhadap layanan P2P Lending secara keseluruhan, meskipun tidak semua penyelenggara LPBBTI beroperasi secara ilegal. Kurangnya pemahaman UMKM terkait perbedaan antara LPBBTI legal yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan LPBBTI ilegal menyebabkan pelaku usaha cenderung bersikap hati-hati bahkan menolak alternatif pembiayaan digital tersebut. Akibatnya, peluang UMKM untuk memperoleh sumber permodalan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel menjadi terbatas yang pada akhirnya dapat menghambat pengembangan usaha dan peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng.

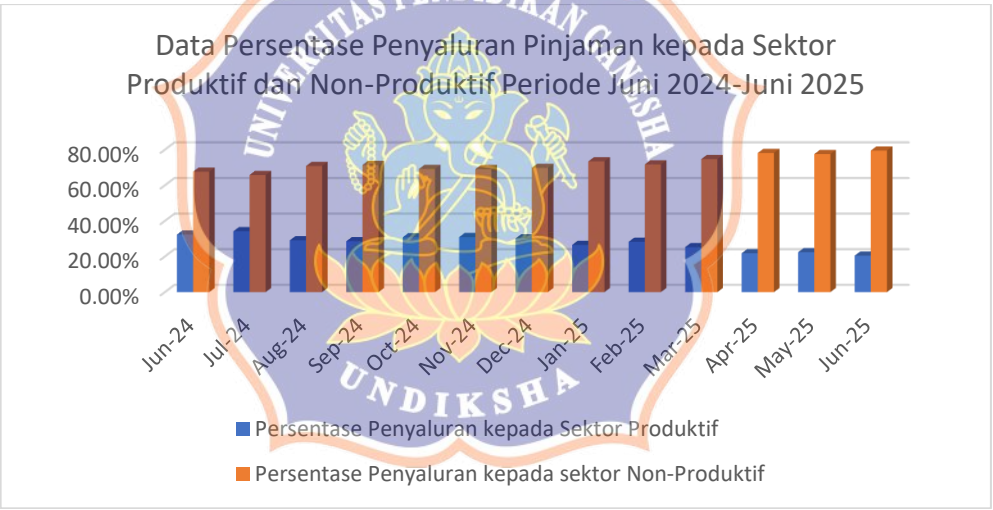

Gambar 1.2
Tren Penyaluran Pinjaman
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025)

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa total penyaluran modal di LPBBTI terus meningkat namun total penyaluran modal masih didominasi oleh sektor non produktif dibanding dengan sektor produktif (UMKM). Bahkan jumlah penyaluran terhadap sektor produktif kian menurun seiring waktu. Tren penurunan penyaluran ke sektor produktif ini, ditambah dengan maraknya platform ilegal, menciptakan

ketakutan di kalangan pelaku UMKM Buleleng. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha terjebak dalam keterbatasan modal internal yang menghambat pertumbuhan kapasitas produksi dan peraihan laba yang lebih besar. Melalui berbagai data sulitnya penyaluran modal tersebut mengindikasi bahwa akses permodalan yang kurang, bisa saja menurunkan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng dalam mencapai laba yang maksimal untuk mengembangkan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamida dkk (2023) menemukan bahwa variabel akses permodalan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Kediri. Penelitian selanjutnya oleh Perdana et al (2023) dan Ulpah dkk (2024) juga mendapatkan hasil bahwa akses pembiayaan berpengaruh siginifikan terhadap kinerja UMKM. Lalu, penelitian oleh Dewi & Masdiantini (2023) menyatakan bahwa akses permodalan menghasilkan pengaruh yang arahnya positif dan juga signifikan terhadap kinerja UMKM di Kec. Buleleng. Akan tetapi, Oktariani et al (2022) memperoleh hasil bahwa akses permodalan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kinerja UMKM pada pelaku usaha subsektor kuliner di Kota Batu. Adanya hasil yang belum konsisten dari penelitian terdahulu tersebut maka diperlukan penelitian kembali terkait pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM.

Faktor kedua yang diduga menentukan keberlanjutan usaha adalah kemampuan menyusun laporan keuangan. Menurut teori RBV kemampuan menyusun laporan keuangan merupakan sumber daya yang termasuk dalam sumber daya modal manusia. Laporan Keuangan adalah instrumen yang menggambarkan dinamika perkembangan usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran). Laporan ini berperan penting sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan yang

bijak dan tepat. Sehingga untuk mencapai laba yang baik salah satu caranya adalah dengan melakukan penyusunan laporan keuangan (Wahid, 2017). Kemampuan menyusun laporan keuangan mencakup integrasi dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajerial dalam mengatur aspek keuangan bisnis, termasuk mengelola arus kas, analisis keuangan, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan yang strategis. Kompetensi keuangan yang kuat dapat menolong UMKM dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial yang ada dan meningkatkan efisiensi operasional (Kusuma & Sulindawati, 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ditegaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, pemegang Izin Usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki, menaati ketentuan yang tercantum di dalamnya, serta menyelenggarakan pembukuan atas aktivitas usahanya. Pembukuan tersebut mencakup penyusunan laporan keuangan yang memisahkan antara aset usaha dan aset pribadi. Namun demikian, pada praktiknya, masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum menyusun pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (L. G. K. Dewi & Sari, 2019). Peningkatan kinerja UMKM dapat terhambat karena permasalahan di bidang Akuntansi dan manajemen, khususnya pada tahap penyusunan laporan keuangan. Akuntansi memainkan peran penting dalam perkembangan usaha. Namun, hingga saat ini ada banyak UMKM yang belum memahami pentingnya akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan, padahal hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan bisnis (Sinarwati dkk., 2020). Para

pelaku UMKM sering kali memfokuskan diri pada kegiatan operasional usaha sehingga mereka melupakan pencatatan transaksi dan membuat laporan keuangan (Ilarrahmah & Susanti, 2021). Selain itu, Penyusunan laporan keuangan wajib mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Namun, pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar tersebut. Kesulitan ini muncul karena standar akuntansi yang digunakan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan belum disesuaikan dengan kondisi nyata usaha, sehingga sulit dipahami oleh pelaku UMKM (Tama dkk., 2018). Minimnya pemahaman mengenai pembukuan maupun akuntansi membuat pelaku UMKM cenderung bersikap apatis terhadap laporan keuangan (Herawati dkk., 2020). Sebagian pelaku UMKM bahkan menganggap laporan keuangan tidak terlalu penting bagi keberlanjutan usaha yang mereka jalankanOleh karena itu, Guna memudahkan pelaku UMKM dalam memahami penyusunan laporan keuangan, serta mengingat pentingnya standarisasi laporan keuangan demi menyamakan persepsi (Afianti, 2017; Tama dkk, 2018), Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk UMKM, dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerapan SAK ETAP bertujuan agar laporan keuangan usaha tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Namun, dalam penerapannya, SAK ETAP belum diterapkan secara optimal oleh pelaku usaha, khususnya UMKM (Tama dkk., 2018).

Keberadaan SAK EMKM seharusnya menjadi panduan bagi pelaku usaha di Kabupaten Buleleng untuk mulai menyusun laporan keuangan. Berdasarkan observasi di lapangan beberapa UMKM terutama pada sektor kuliner terdapat 6

UMKM yang belum melakukan penyusunan laporan keuangan. Padahal, meskipun kewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan mungkin berbeda-beda tergantung pada ukuran dan hukum negara, UMKM dapat memperoleh manfaat dari menyiapkan laporan keuangan, antara lain: Memantau kinerja keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, memfasilitasi hal-hal seperti penambahan modal dan pengambilan keputusan perpajakan, Transparansi dan akuntabilitas. Meski berukuran lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, namun tetap memiliki pelaporan keuangan yang baik (Widia, 2025). Sebagian besar UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha, sehingga pemilik merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun laporan keuangan yang memadai. Jika pun membuat laporan, biasanya hanya berupa catatan sederhana mengenai kas masuk dan kas keluar (Herawati dkk., 2020).

Penyusunan laporan keuangan yang tertib dan sistematis memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola keuangan secara lebih efektif. Tanpa adanya pencatatan yang baik, keputusan usaha sering kali diambil secara keliru karena minimnya informasi yang akurat. Pelaku UMKM tidak mengetahui dengan pasti berapa total dana yang mereka miliki, berapa besar modal yang digunakan, jumlah utang dan piutang, maupun kondisi laba atau rugi yang sedang dialami. Situasi ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak UMKM gagal memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Inilah yang menjadi masalah mengapa banyak UMKM yang tidak mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal.

Penelitian oleh Wahid (2017) Ilarrahmah & Susanti (2021), dan Kusuma & Sulindawati (2024) menemukan bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Akan

tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Zarefar dkk (2021) memperoleh hasil bahwa kemampuan menyusun laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Melalui penelitian terdahulu tersebut hasil penelitian beberapa peneliti masih tidak konsisten sehingga kajian mengenai kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap UMKM perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka penulis memilih variabel ini untuk diteliti lagi.

Faktor ketiga adalah penerapan digitalisasi pencatatan keuangan dimana dalam klasifikasinya sumber daya ini berperan sebagai sumber daya fisik perusahaan. Saat ini, perkembangan teknologi turut menghadirkan alternatif bagi UMKM dalam mengelola keuangan usaha, yaitu melalui digitalisasi pencatatan keuangan dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Urgensi penerapan digitalisasi pada UMKM didukung oleh tren peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 80,66%, angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

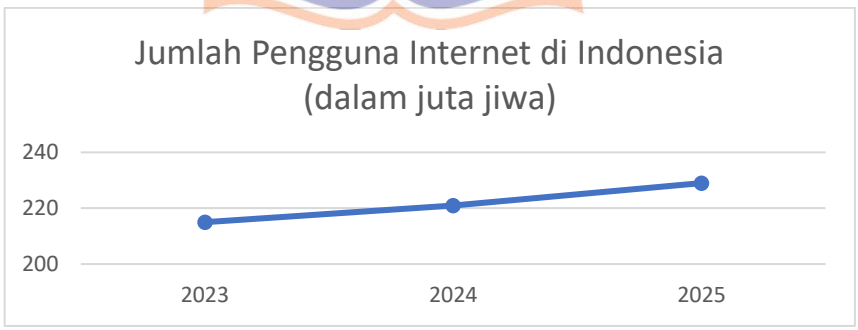

Gambar 1.3
Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2023-2025
(Sumber: Data Diolah Penulis APJII, 2025)

Meskipun perkembangan internet berlangsung pesat dan diiringi dengan semakin banyaknya layanan serta aplikasi teknologi keuangan yang ditujukan bagi

pelaku usaha, pada kenyataannya masih terdapat banyak UMKM yang belum mampu menerapkan aplikasi akuntansi secara optimal. Tidak semua UMKM mengetahui digitalisasi yang terjadi pada saat ini, bahkan banyak UMKM yang belum melakukan pengelolaan keuangan yang baik (Maulida dkk., 2021). Menurut Tanveer dkk., (2026) adopsi teknologi digital bukan sekadar cara untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis, melainkan juga untuk menata ulang model bisnis karena memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, koordinasi berbasis platform, dan penciptaan nilai pada tingkat ekosistem. Di Indonesia sebagian besar UMKM menjalankan usahanya dengan cara-cara tradisional, termasuk dalam pengelolaan keuangannya, produksi dan juga pemasaran (Ekawati dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi digital dengan tingkat pemanfaatannya di kalangan pelaku UMKM. Di Kabupaten Buleleng para pelaku UMKM, diberikan pelatihan melalui gema UMKM, yang dapat meningkatkan kualitas dengan beralih dari metode transaksi dan pemasaran konvensional ke platform digital. UMKM (Ekawati dkk., 2025). Namun, Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada beberapa UMKM di Kota Singaraja, masih dijumpai pelaku usaha terutama pada skala usaha mikro belum melakukan pencatatan keuangan secara digital dan cenderung mengandalkan pencatatan manual sederhana, bahkan sebanyak 11 pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan yang rata-rata hal ini dilatarbelakangi oleh kesibukan pelaku UMKM kuliner dalam menyiapkan masakan dan melayani pembeli dari pagi hingga malam, selain itu mereka juga tidak merekrut karyawan karena tidak mampu dalam menggaji sehingga pemilik melakukannya sendiri dan tidak dapat membuat

pencatatan keuangan sehingga uang modal dan uang pribadi pemilik menjadi tercampur.

Keterbatasan dalam penerapan digitalisasi pencatatan keuangan ini tidak hanya mencerminkan rendahnya adopsi teknologi, tetapi juga berpotensi berdampak pada kualitas pengambilan keputusan usaha. Tanpa dukungan sistem pencatatan keuangan yang tertata dan berbasis data, UMKM berisiko mengalami inefisiensi pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kinerja keuangan. Argumen tersebut didukung dari adanya beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Anjarwati dkk (2023) menyatakan bahwa digitalisasi akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap efisiensi dan pengurangan biaya pada UMKM di Kota Bandung. Adapun oleh Wiadnyana & Wahyuni (2023) penggunaan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android SiAPIK pada UMKM mampu meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diduga bahwa digitalisasi pencatatan keuangan membawa kinerja UMKM ke arah yang positif namun berdasarkan data pada tabel 2 bahwa kinerja keuangan UMKM di Buleleng masih rendah maka, digitalisasi pencatatan keuangan menjadi aspek yang relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis berminat melakukan penelitian terkait pengaruh akses permodalan, kemampuan menyusun laporan keuangan, dan digitalisasi pencatatan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Agar lebih terfokus, penelitian yang akan dilakukan hanya mencakup UMKM bersektor kuliner di wilayah Kabupaten Buleleng. Studi ini penting untuk dilakukan karena sektor kuliner memiliki posisi

strategis dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng, baik melalui kontribusinya terhadap PDRB maupun perannya dalam menyerap tenaga kerja. Namun, peran tersebut juga diiringi dengan tantangan, terutama terkait kesiapan UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Keterbatasan akses permodalan dapat menghambat kemampuan UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, sementara rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan serta belum optimalnya digitalisasi pencatatan keuangan berpotensi menyulitkan pelaku usaha dalam mengelola arus kas, menentukan harga secara tepat, dan memastikan tingkat kinerja keuangan usaha. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, UMKM berisiko tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari implementasi program tersebut secara optimal.

Selain itu, meski peran akses permodalan, kemampuan menyusun laporan keuangan, dan digitalisasi pencatatan keuangan telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Secara khusus, kajian empiris yang menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan UMKM masih relatif terbatas, terutama dalam konteks sektor kuliner di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut mengenai pengaruh akses permodalan, kemampuan penyusunan laporan keuangan, dan digitalisasi pencatatan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di wilayah Kabupaten Buleleng. Melalui latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Akses Permodalan, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan, dan Digitalisasi Pencatatan**

Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Buleleng".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten di Bali yang mengalami peningkatan jumlah UMKM secara signifikan dari 2019-2023 akan tetapi, sebanyak 5.231 UMKM Kabupaten Buleleng masih tergolong UMKM dengan performa yang rendah.
2. Adanya tantangan serius pelaku usaha dalam memperoleh permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dilihat dari data DJPB Provinsi Bali, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi penyaluran KUR di Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 14,46%.
3. Pelaku usaha di Kabupaten Buleleng masih ada yang mengalami penolakan dalam pengajuan kredit di bank karena belum bisa memenuhi syarat administrasi kredit tersebut.
4. Tersedianya layanan *P2P Lending* untuk membantu masalah permodalan namun sebagian besar pelaku usaha merasa takut untuk menggunakan layanan tersebut karena maraknya layanan *P2P Lending* ilegal.
5. Penyaluran modal oleh *P2P Lending* masih didominasi oleh sektor non produktif dibanding dengan yang produktif.
6. IAI telah menerbitkan SAK EMKM untuk memudahkan implementasi oleh pelaku usaha. Akan tetapi, UMKM Buleleng terutama sektor kuliner belum banyak yang mampu menyusun laporan keuangan dan menggabungkan uang hasil usaha dengan uang pribadi.

7. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66% hal ini menunjukkan Indonesia sudah mengalami digitalisasi bahkan ke berbagai bidang kehidupan, tetapi tidak semua UMKM mengetahui digitalisasi yang terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis memutuskan untuk melakukan pembatasan agar permasalahan yang diteliti dapat lebih fokus dan tidak melebar. Penelitian ini hanya membahas terkait variabel akses permodalan, kemampuan menyusun laporan keuangan, dan digitalisasi pencatatan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada UMKM yang termasuk sektor kuliner di Kabupaten Buleleng saja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kemampuan menyusun laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah digitalisasi pencatatan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk menguji pengaruh akses permodalan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng.
2. Bertujuan untuk menguji kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng.
3. Bertujuan untuk menguji digitalisasi pencatatan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori Resource-Based View. Selain itu, berkontribusi dalam pengembangan mata kuliah akuntansi keuangan, Sistem Informasi, Kewirausahaan, Akuntansi Manajemen, dan Pengantar Bisnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya untuk pengembangan topik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan teori-teori akuntansi keuangan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis terkait pengaruh akses permodalan, kemampuan menyusun laporan keuangan, dan digitalisasi pencatatan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor kuliner yang ada di Kabupaten Buleleng.

2. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk bahan evaluasi dan motivasi bagi pemilik usaha untuk mulai memperhatikan ketiga aspek tersebut yakni akses permodalan, kemampuan menyusun laporan keuangan, dan digitalisasi pencatatan keuangan agar dapat mengelola usahanya sehingga memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi dan kesiapan UMKM kuliner dalam mengelola keuangan. Hal ini dapat membantu lembaga keuangan dalam menyempurnakan penyaluran kredit atau bantuan modal yang lebih efektif dan efisien bagi sektor kreatif di Buleleng.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transformasi digital UMKM serta memperkuat bantuan permodalan kepada UMKM. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.

5. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pustaka di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya pada Fakultas Ekonomi. Data lapangan yang diperoleh dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi universitas (dosen dan organisasi kemahasiswaan) dalam menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan atau menentukan bentuk pengabdian yang berhubungan dengan kewirausahaan.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, pembandingan, dan literatur tambahan bagi mahasiswa lain yang sedang meneliti topik serupa atau referensi dalam menentukan topik penelitian selanjutnya.